



BUPATI Kaur

Provinsi Bengkulu

Peraturan Bupati Kaur

Nomor 100 Tahun 2023

Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

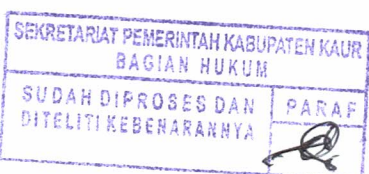
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

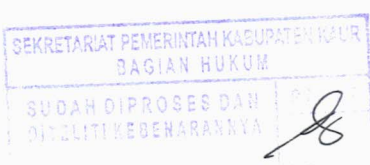
Bupati Kaur,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

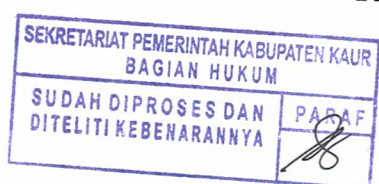
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



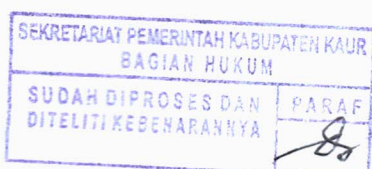
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);



10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah, urusan pemerintah Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PERM.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
25. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
26. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
27. Peraturan Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-441 Tahun 2010 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;



29. Peraturan Bupati Kaur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Kaur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
- c. Bupati adalah Bupati Kaur.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.
- e. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur.
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur.
- g. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur.
- h. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis dalam Dinas/Badan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- j. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



BAB XL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 387

Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 466) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 92 Tahun 2022 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1096) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 388

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 10 Juli 2023

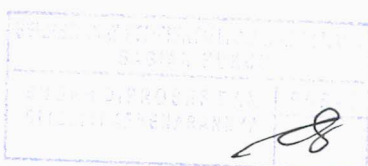
Plt. BUPATI KAUR,


HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 11 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

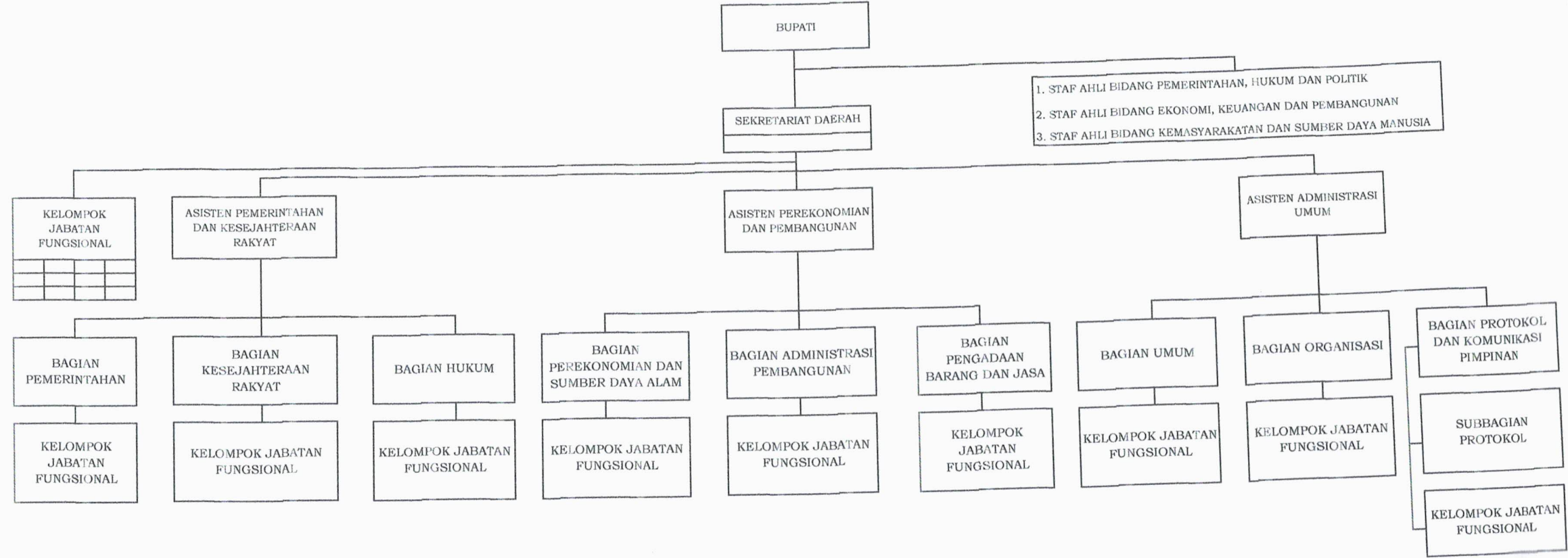

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 1256



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Pt. BUPATI KAUR,

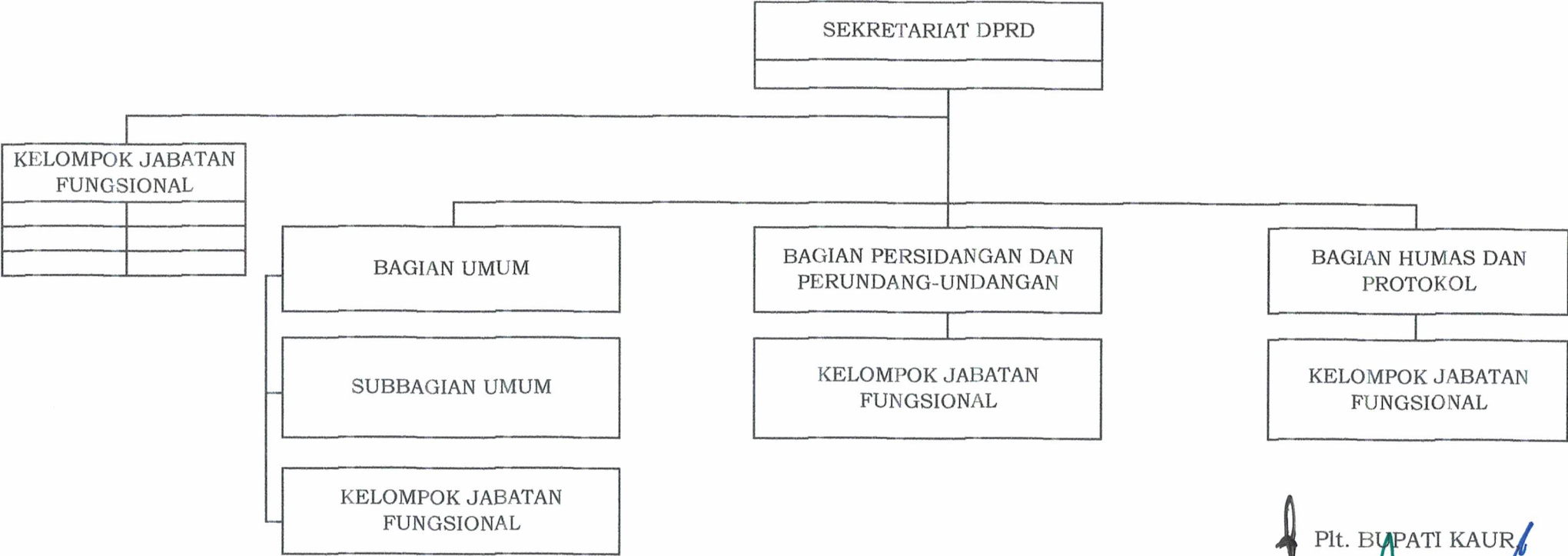
HERLIAN MUCHRIM

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEDIPATANNYA
PARA

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023

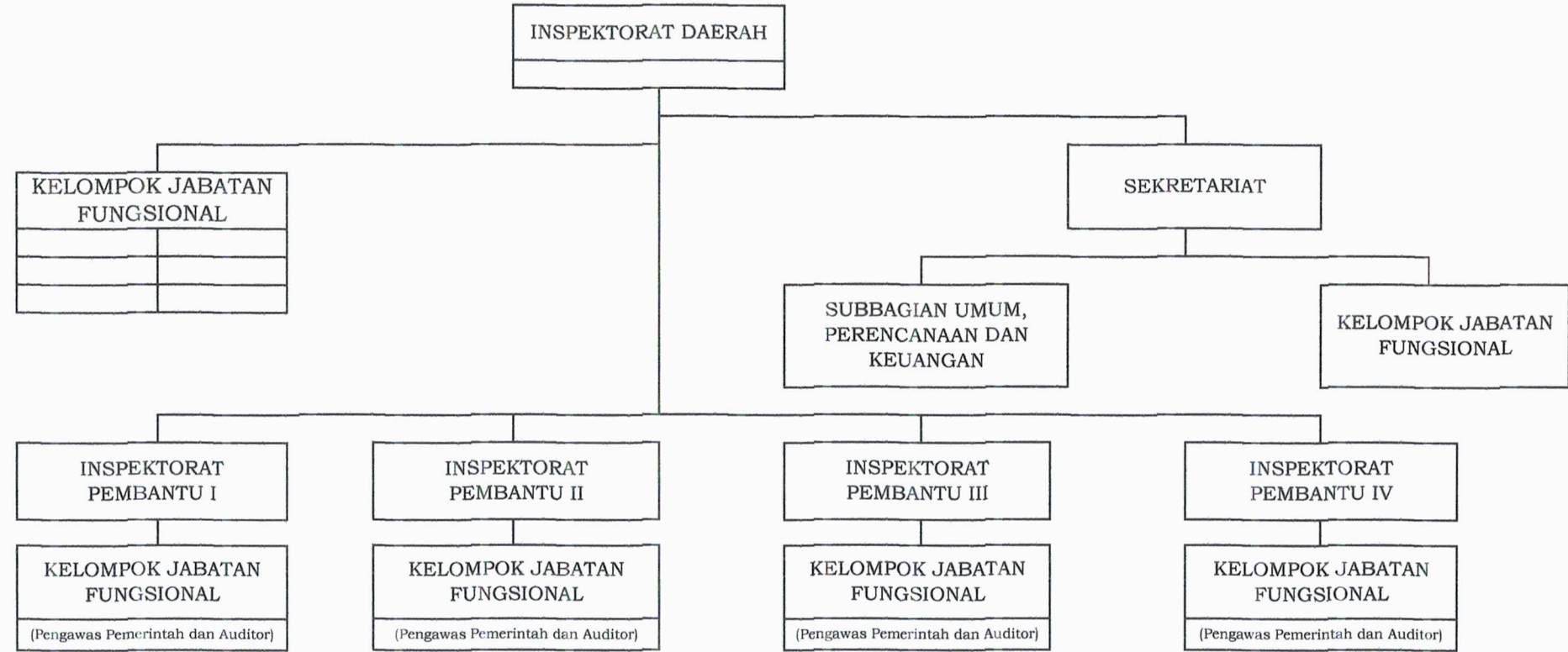


SEKRETARIAT PERENCANAAN KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DINILAI KECERASANNYA

Plt. BUPATI KAUR
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
SAGIAH HUKUM
EMBAH DIPROSES DAN
DIPUTUSI SEBENARNYA
PARAF

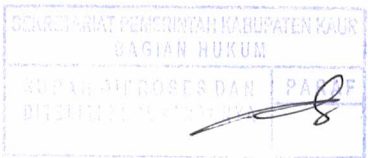
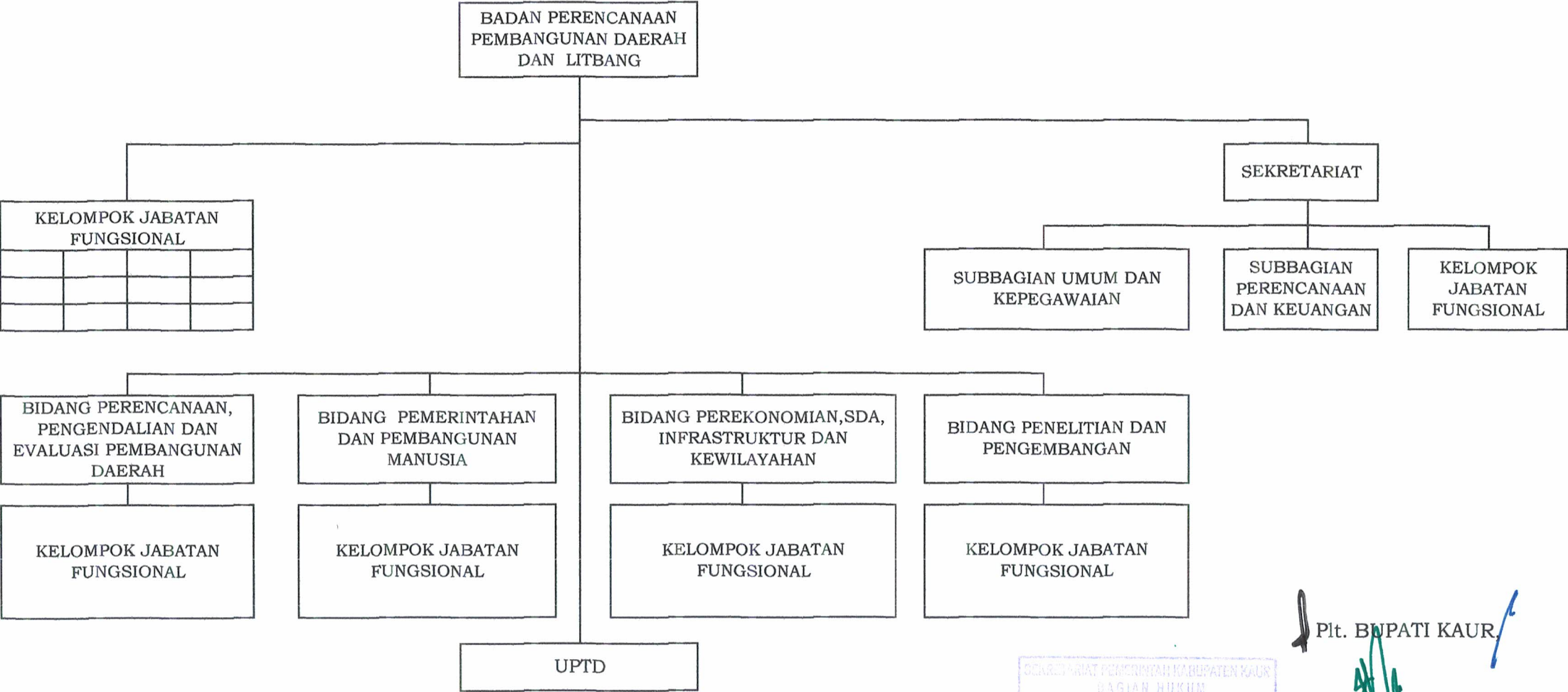
Plt. BUPATI KAUR
J.HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 100

TANGGAL : 10 Juli 2023

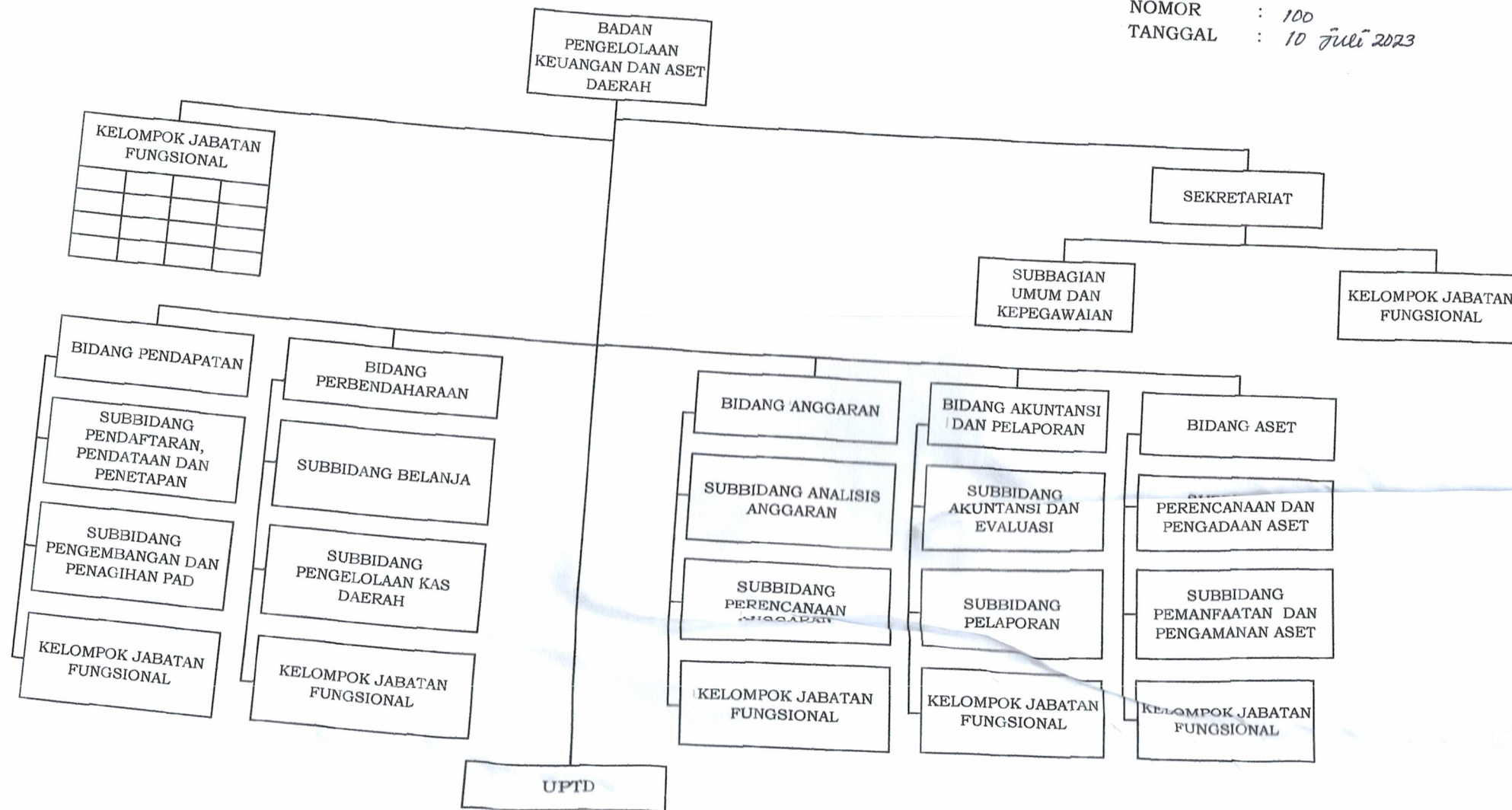


Plt. BUPATI KAUR.

HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

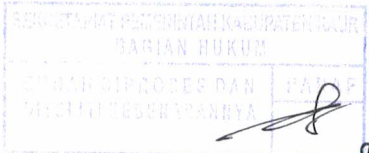
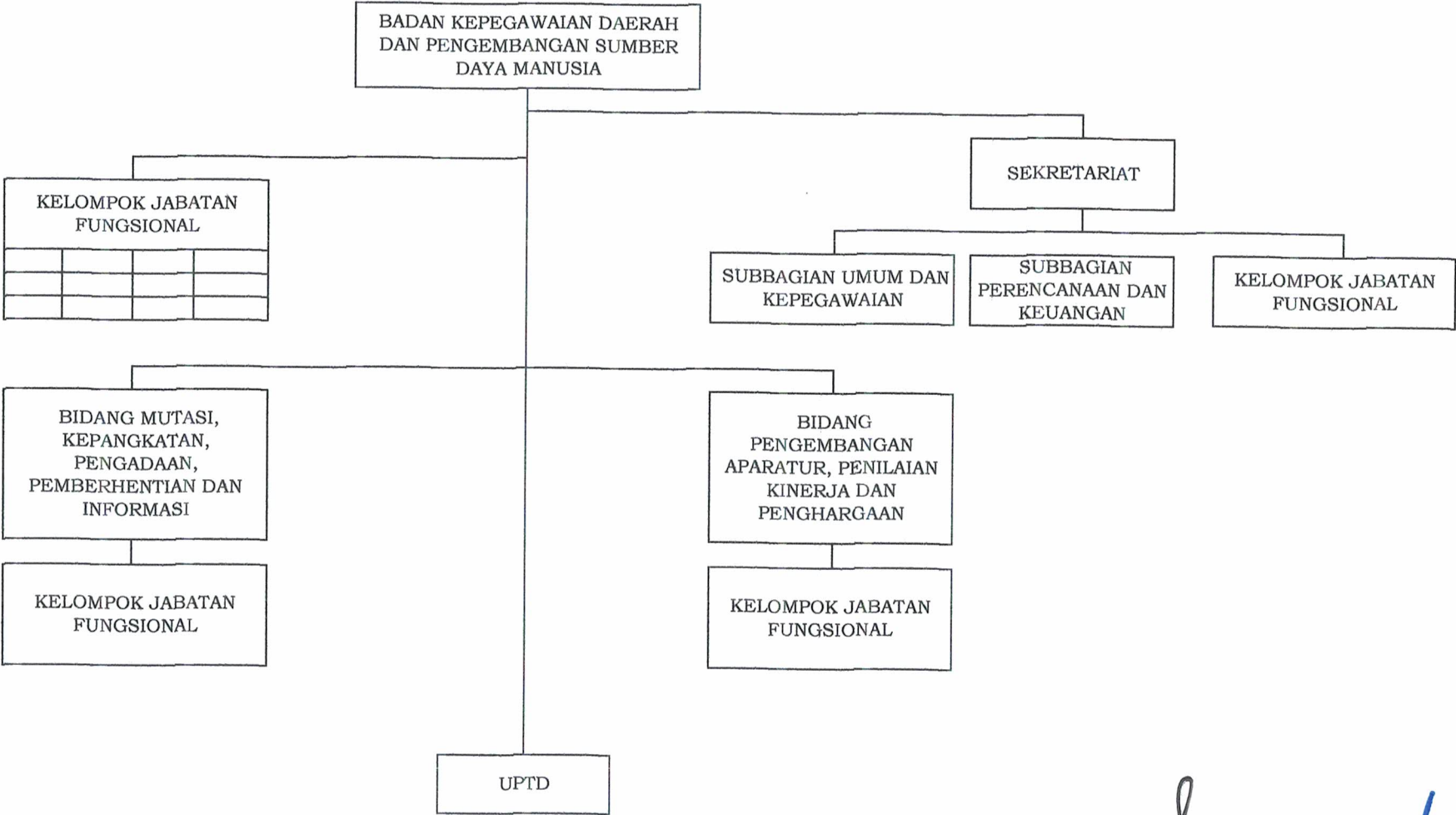
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR : 100
 TANGGAL : 10 Juli 2023



SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 SUDAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA

Pt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM



Pt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM



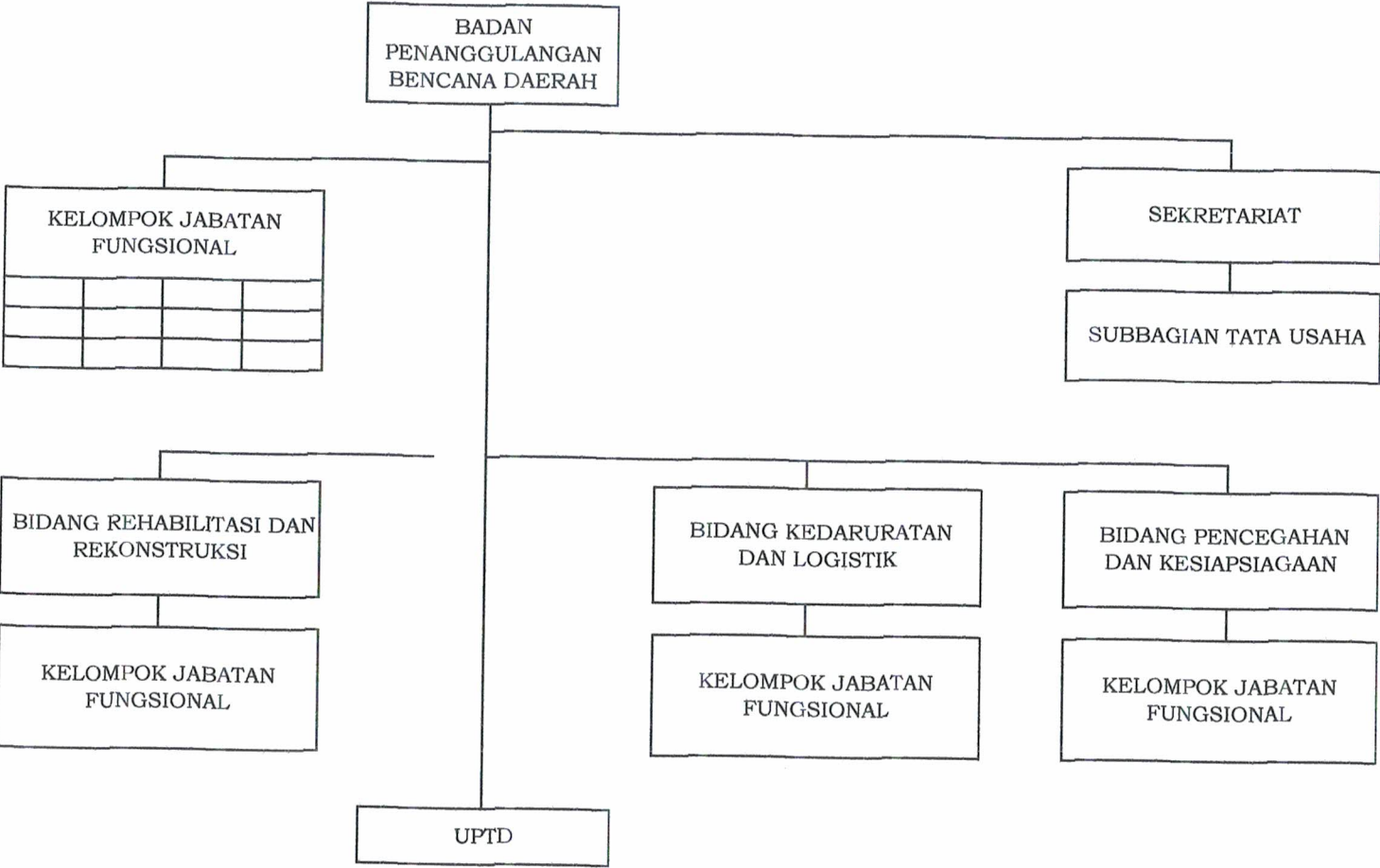
Plt. BUPATI KAUR, 
P.HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 100

TANGGAL : 10 Juli 2023



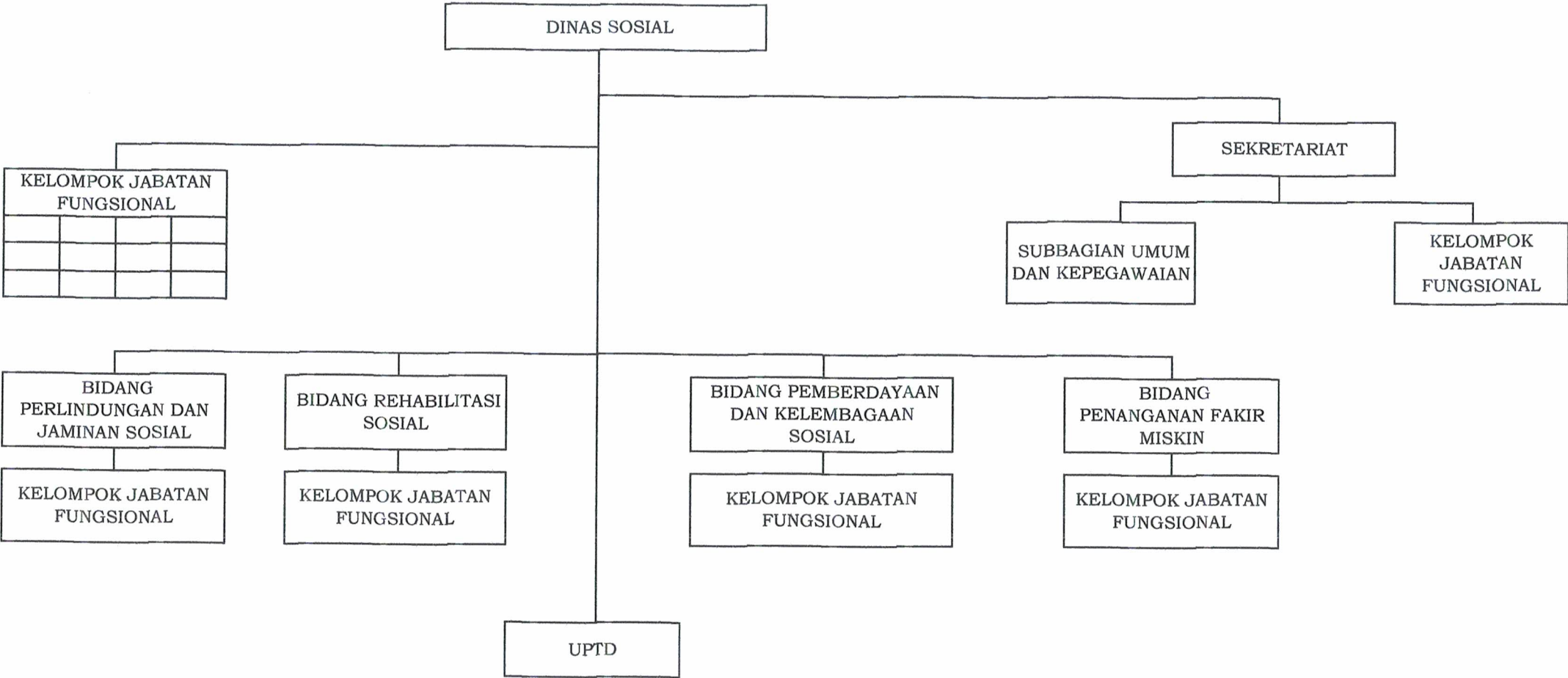
Pt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM

KEPIMPINAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DIPERIKSA

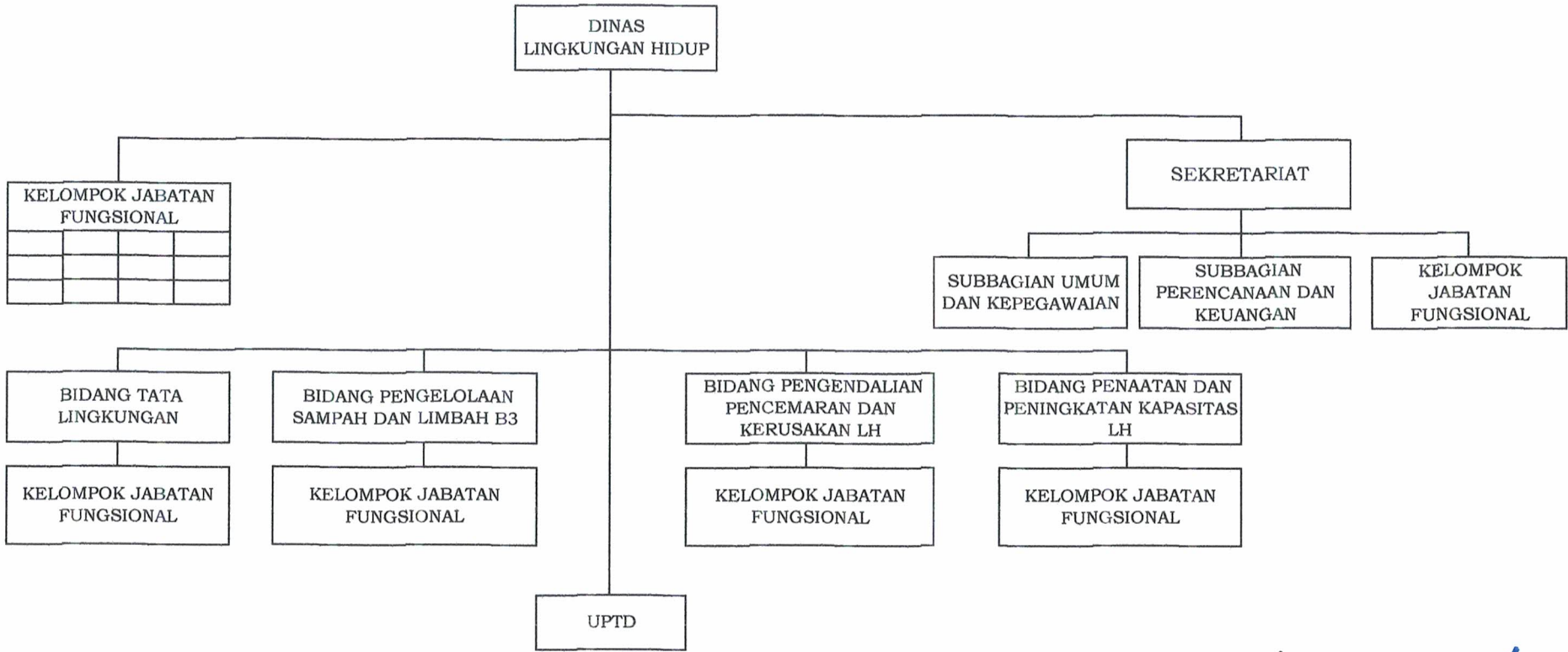
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

LAMPIRA I. PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



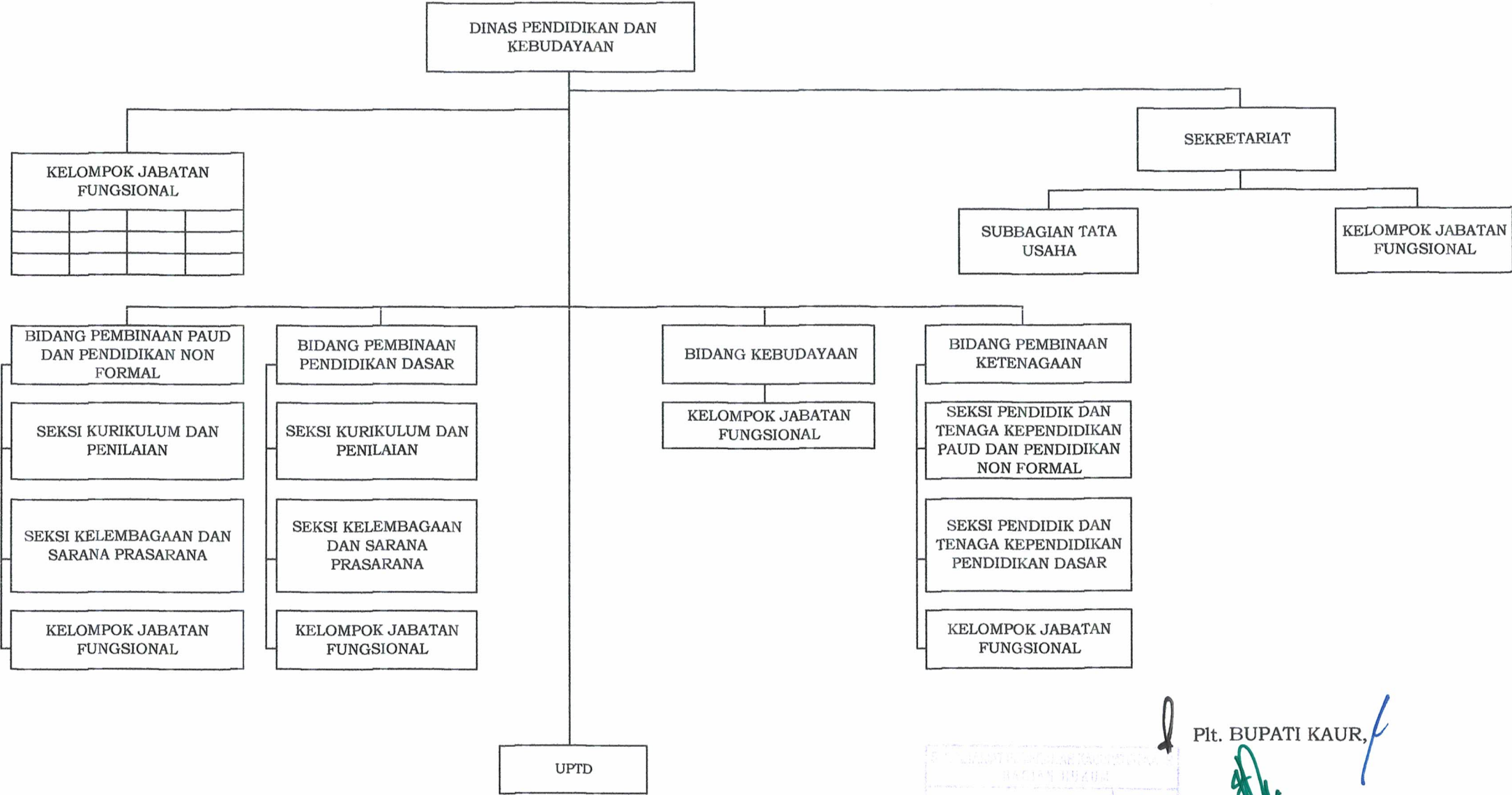
SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
STAMPING DAN
CAPSIL GUBERNURNYA

Plt. BUPATI KAUR,
[Signature]
D.HERLIAN MUCHRIM



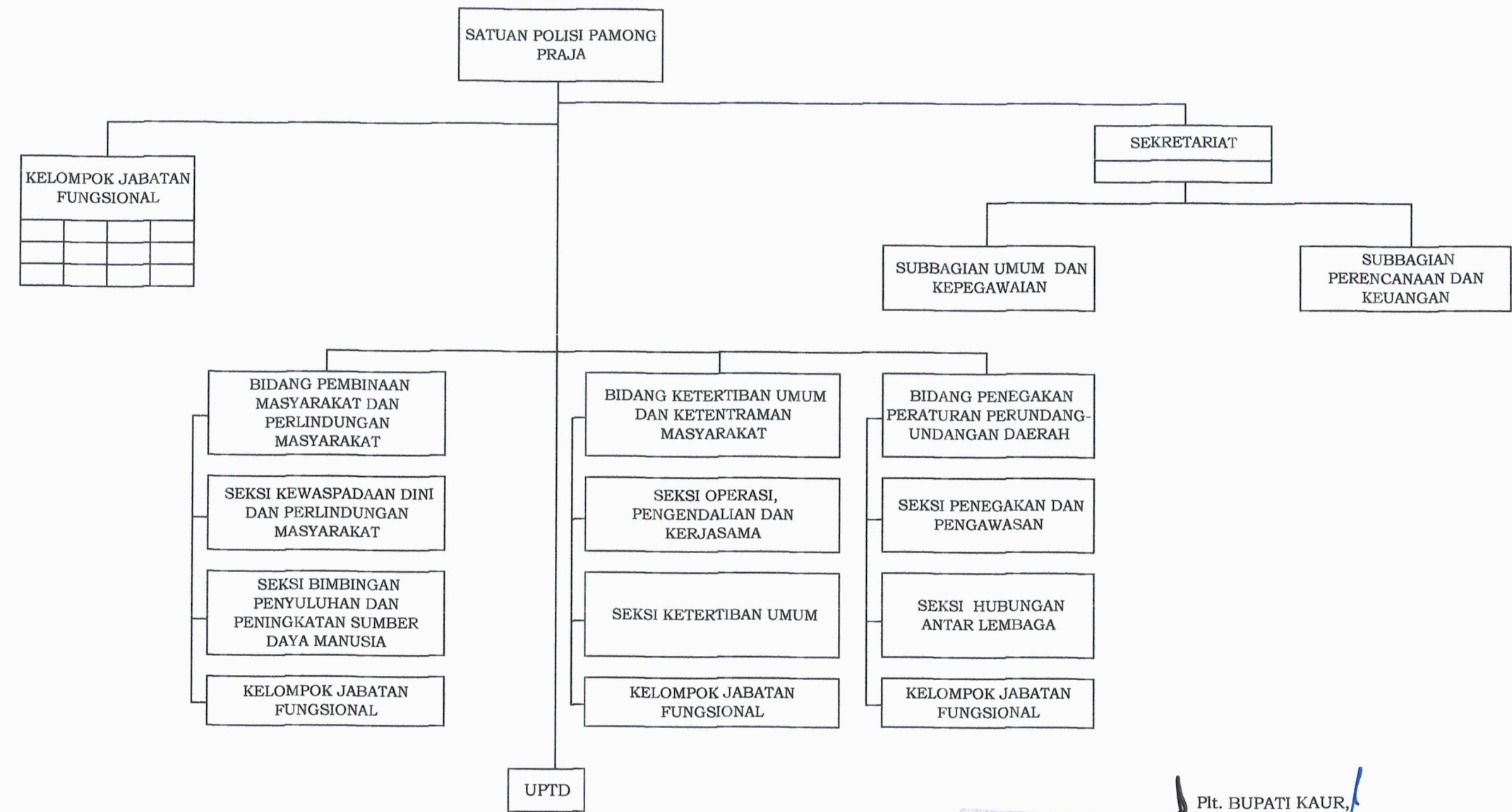
Plt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM



Plt. BUPATI KAUR, 

g. HERLIAN MUCHRIM



Pt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM

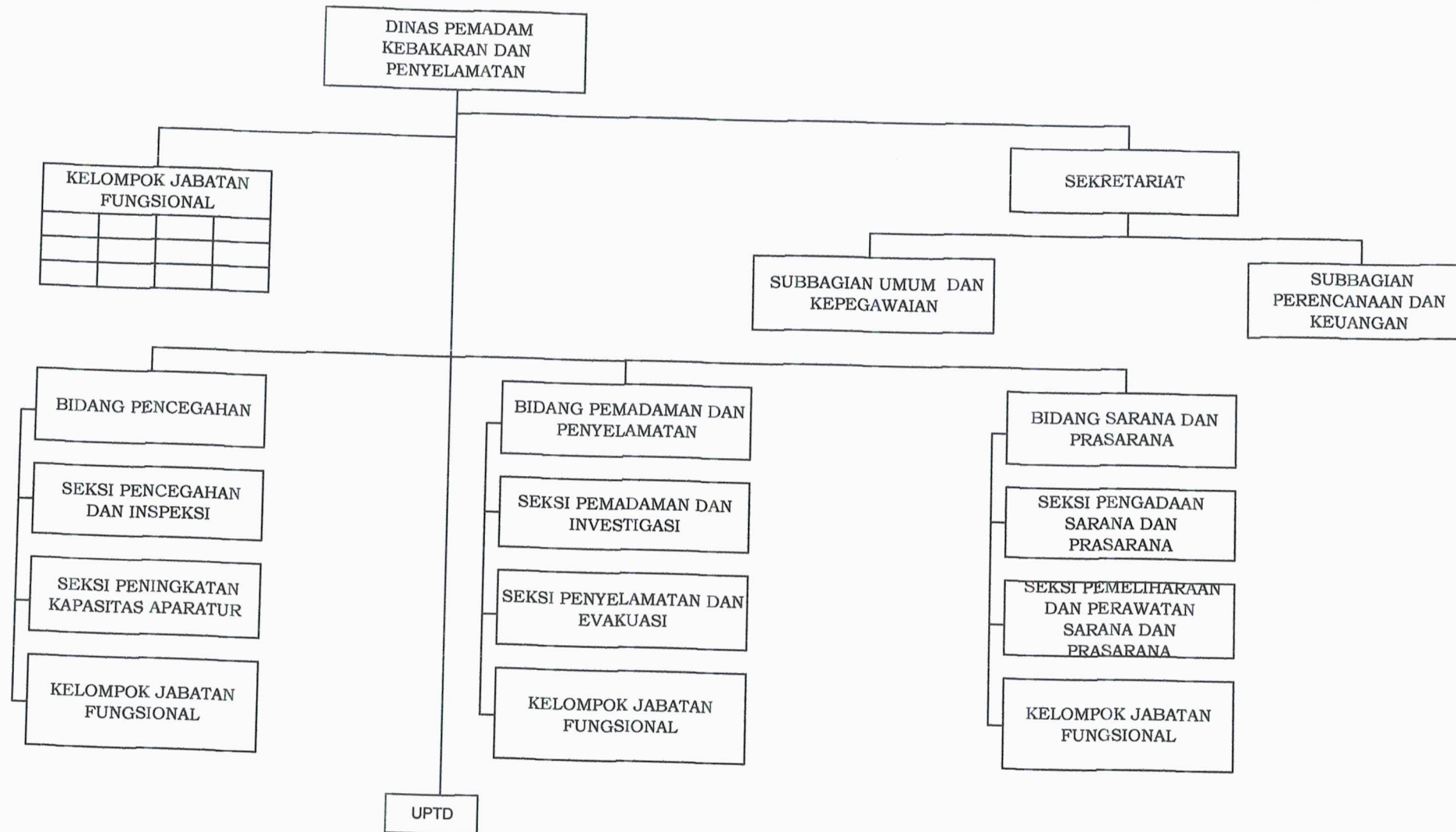
SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITETAPKAN

STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI KAUR

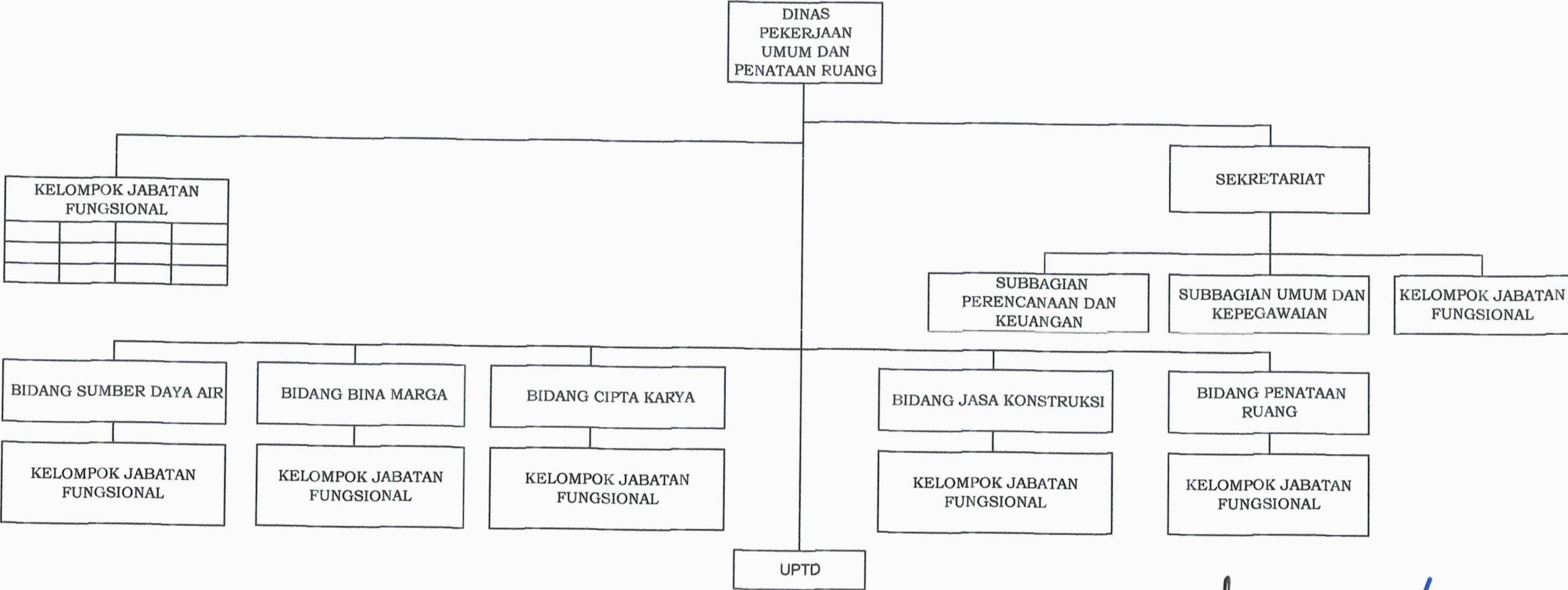
NOMOR : 100

TANGGAL : 10 Juli 2023



Pt. BUPATI KAUR,

HERLIAN MUCHRIM

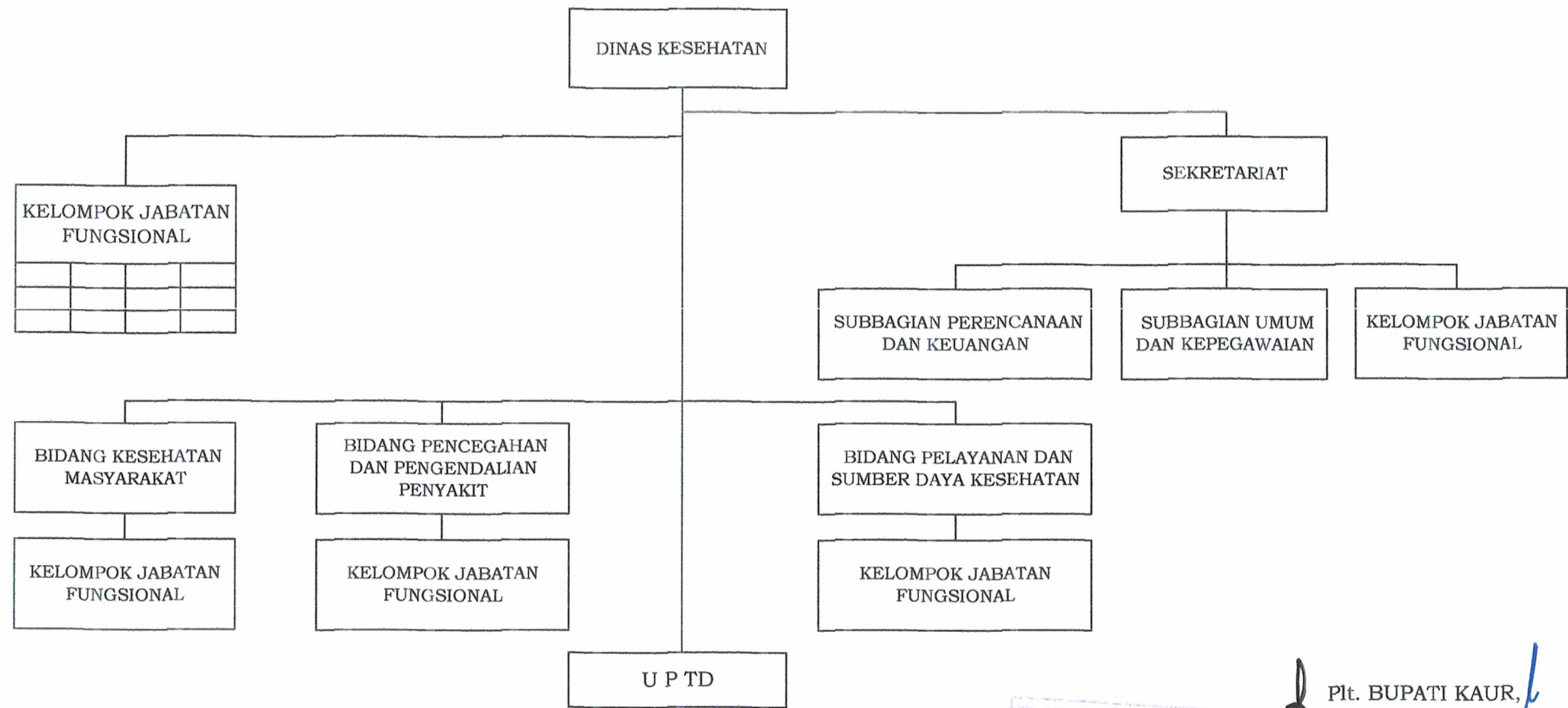


SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DIVISI HUKUM
SUBDIVISI HUKUM DAN
DOKUMENTASI

Plt. BUPATI KAUR,
[Signature]
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

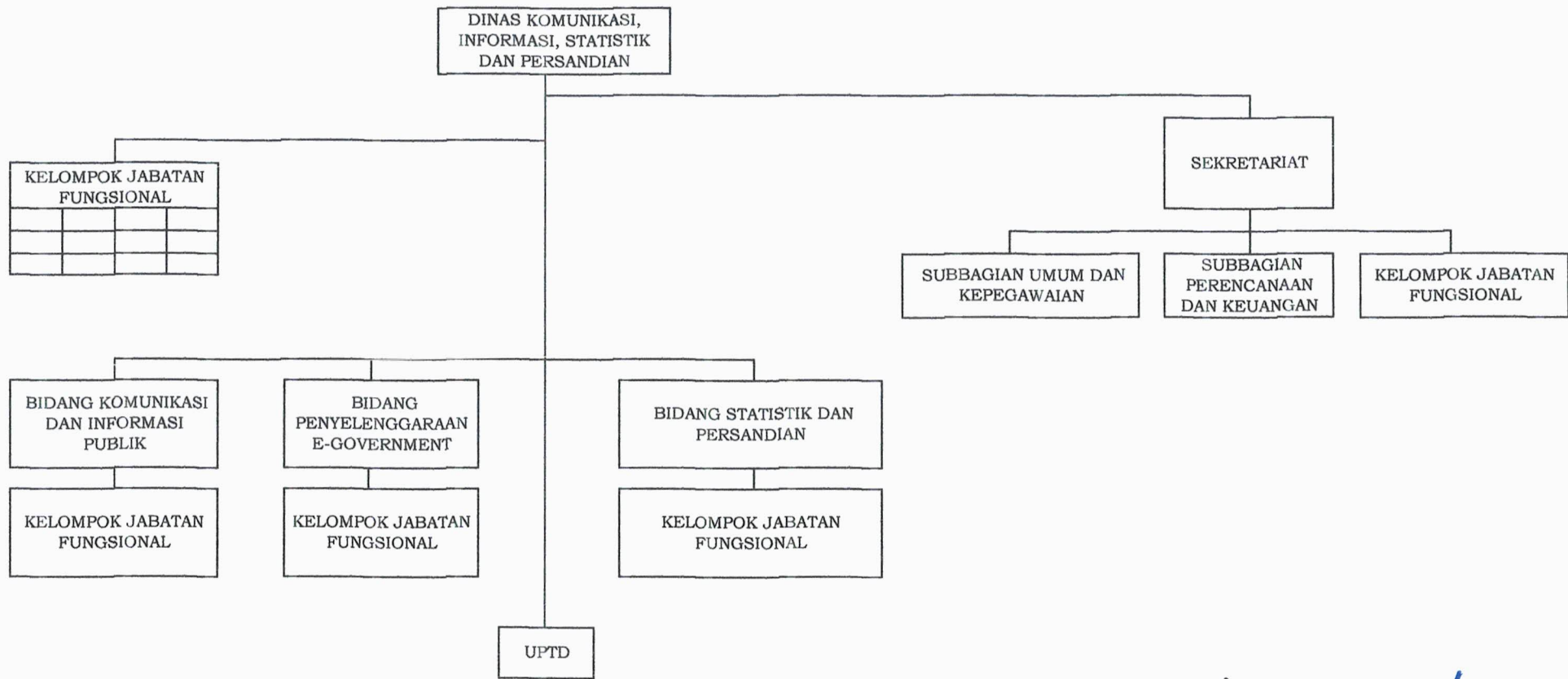
LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Plt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Plt. BUPATI KAUR,

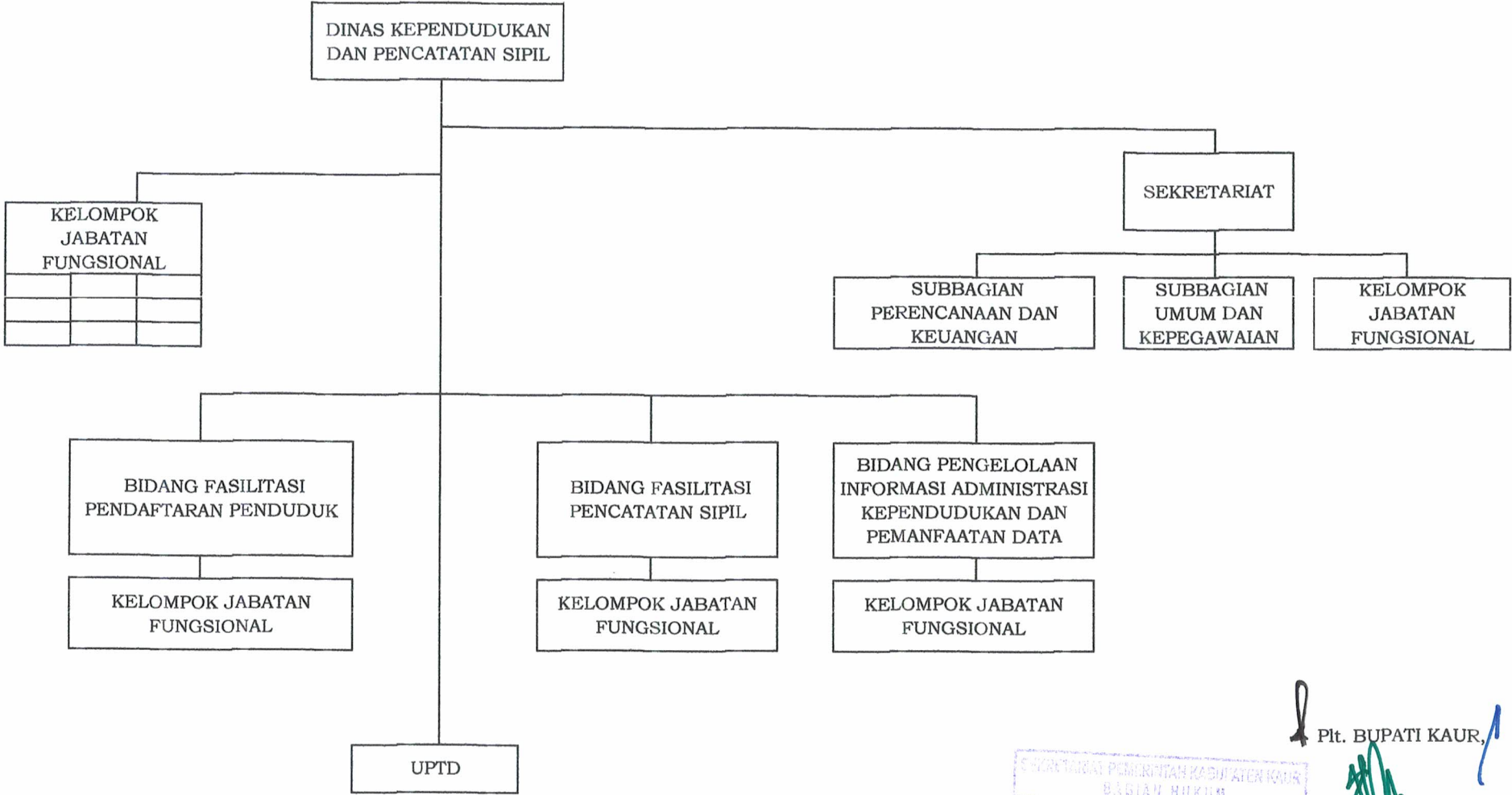
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 100

TANGGAL : 10 Juli 2023



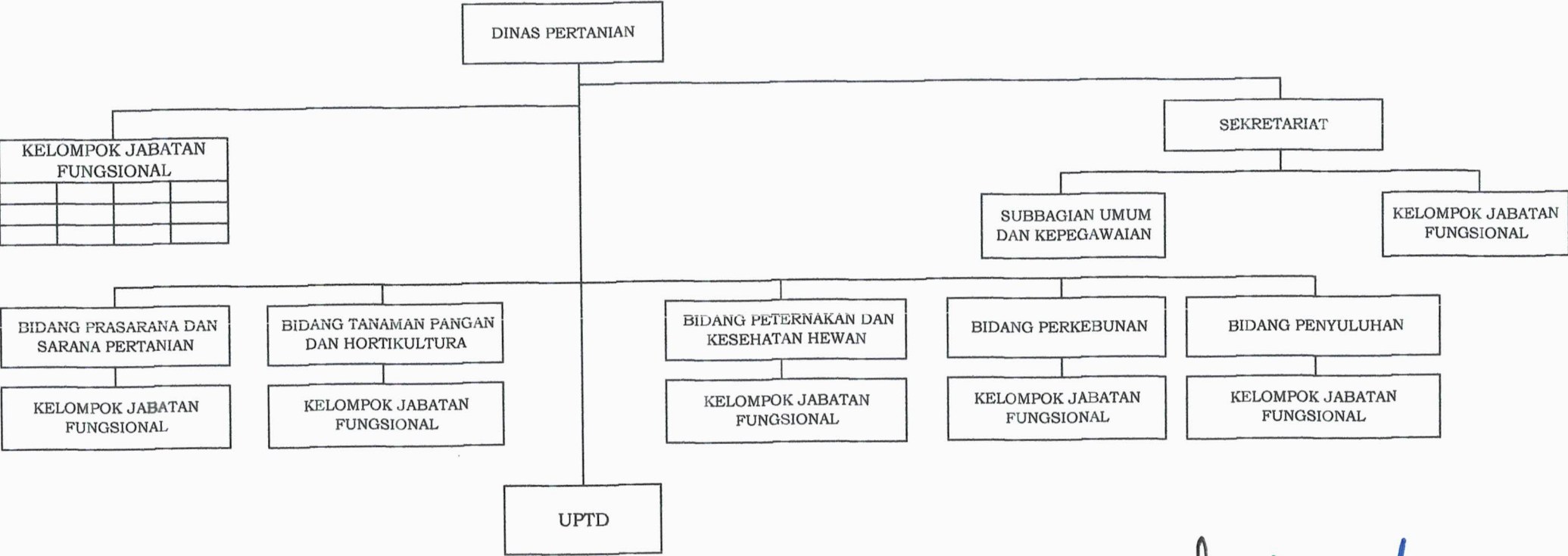
Plt. BUPATI KAUR,



HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN

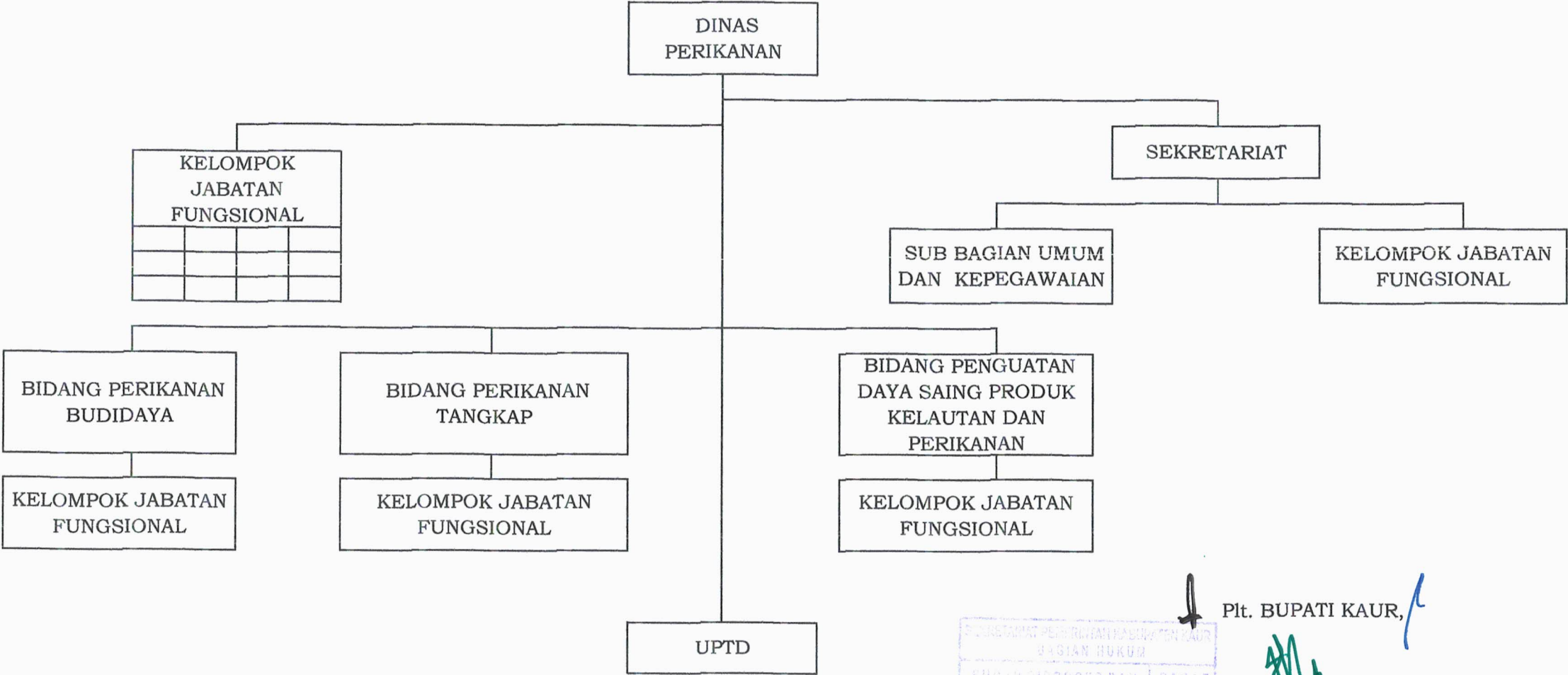
LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



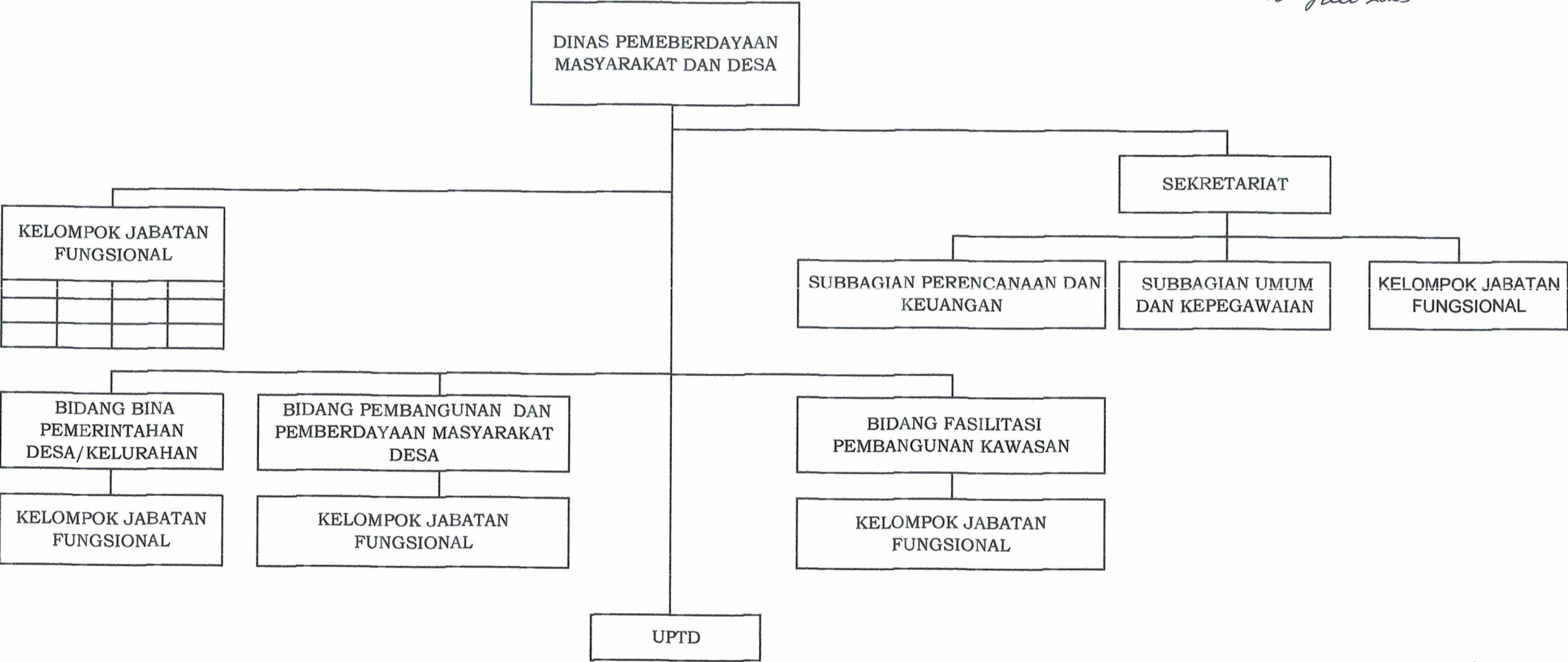
Pt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Plt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM

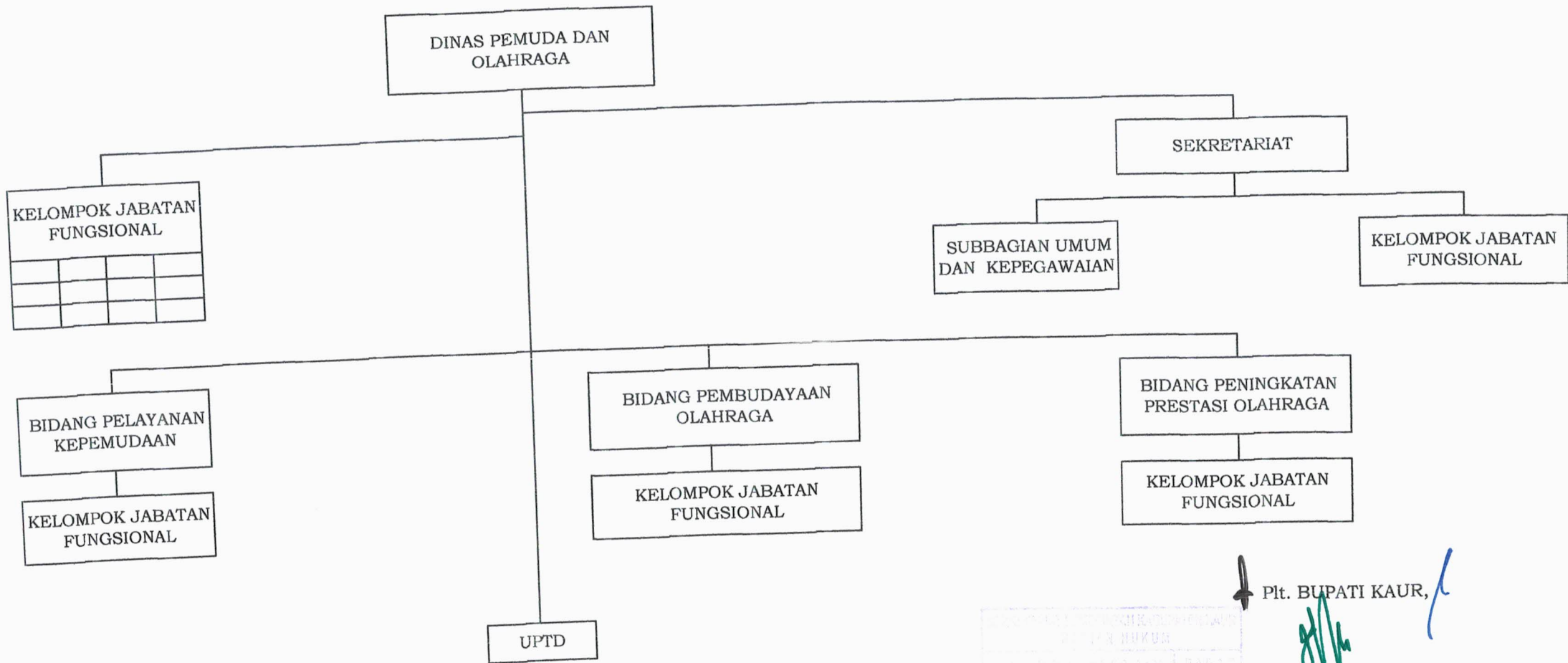


Plt. BUPATI KAUR,


HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAUR

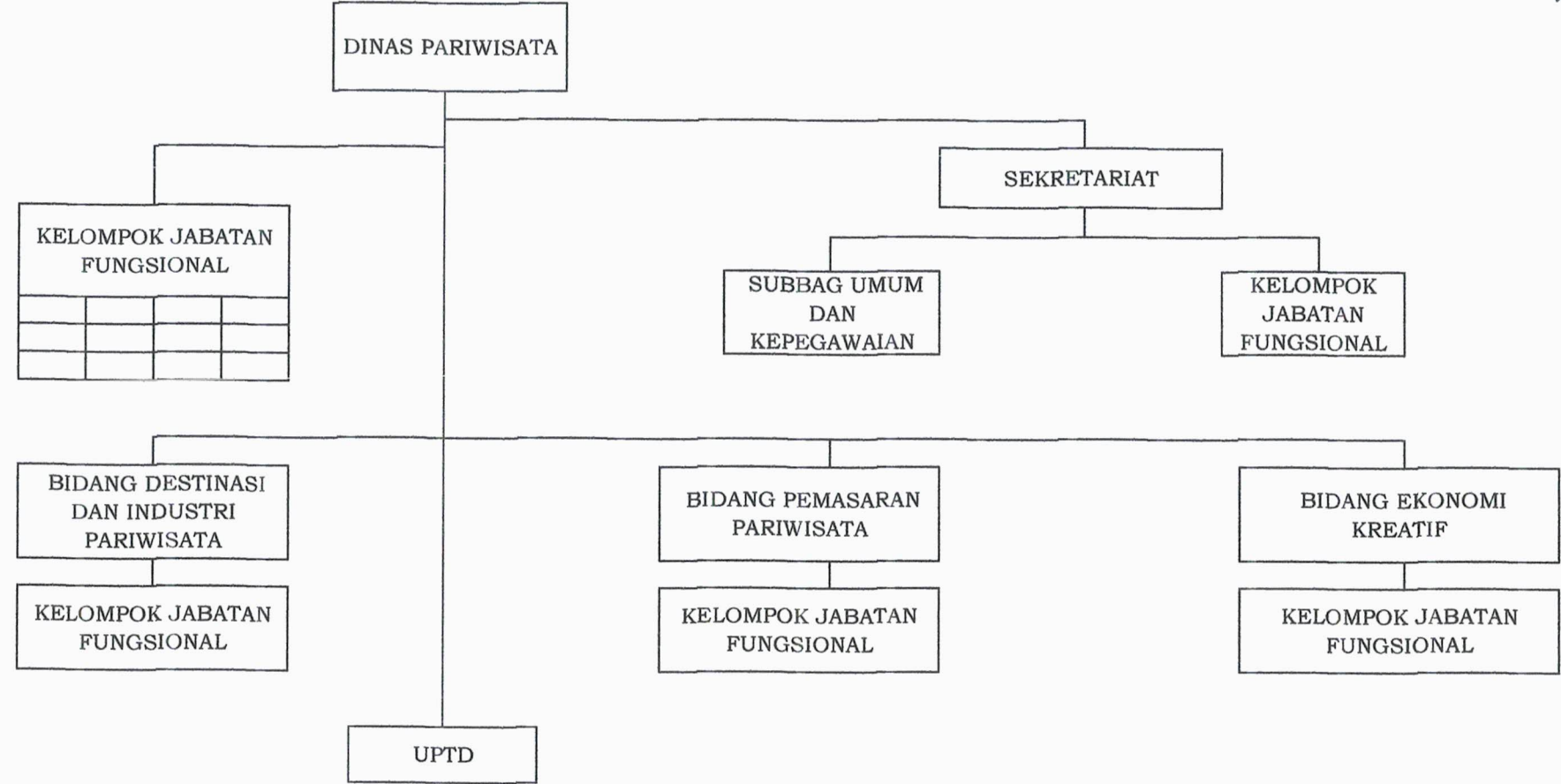
LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Pt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM

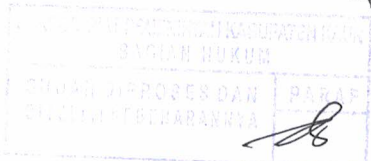
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Pt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

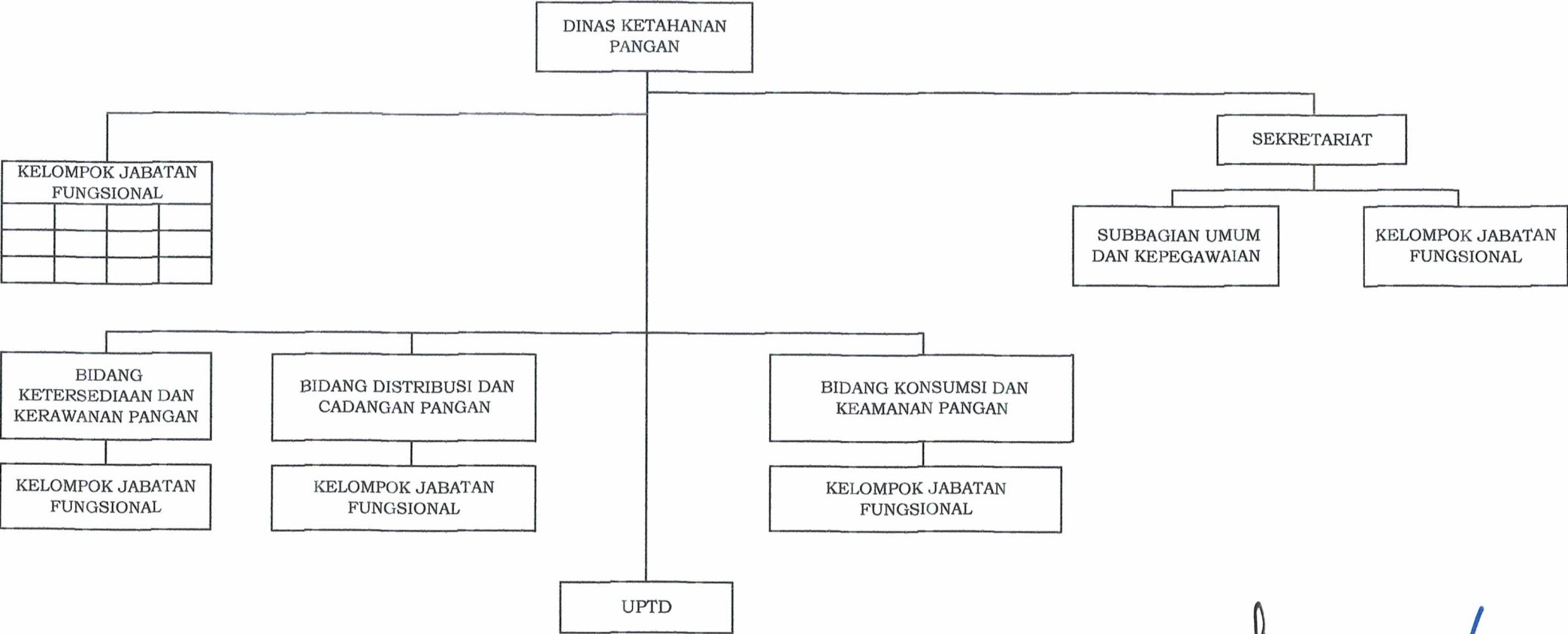


Pt. BUPATI KAUR, 

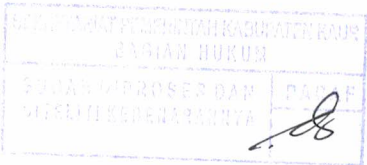
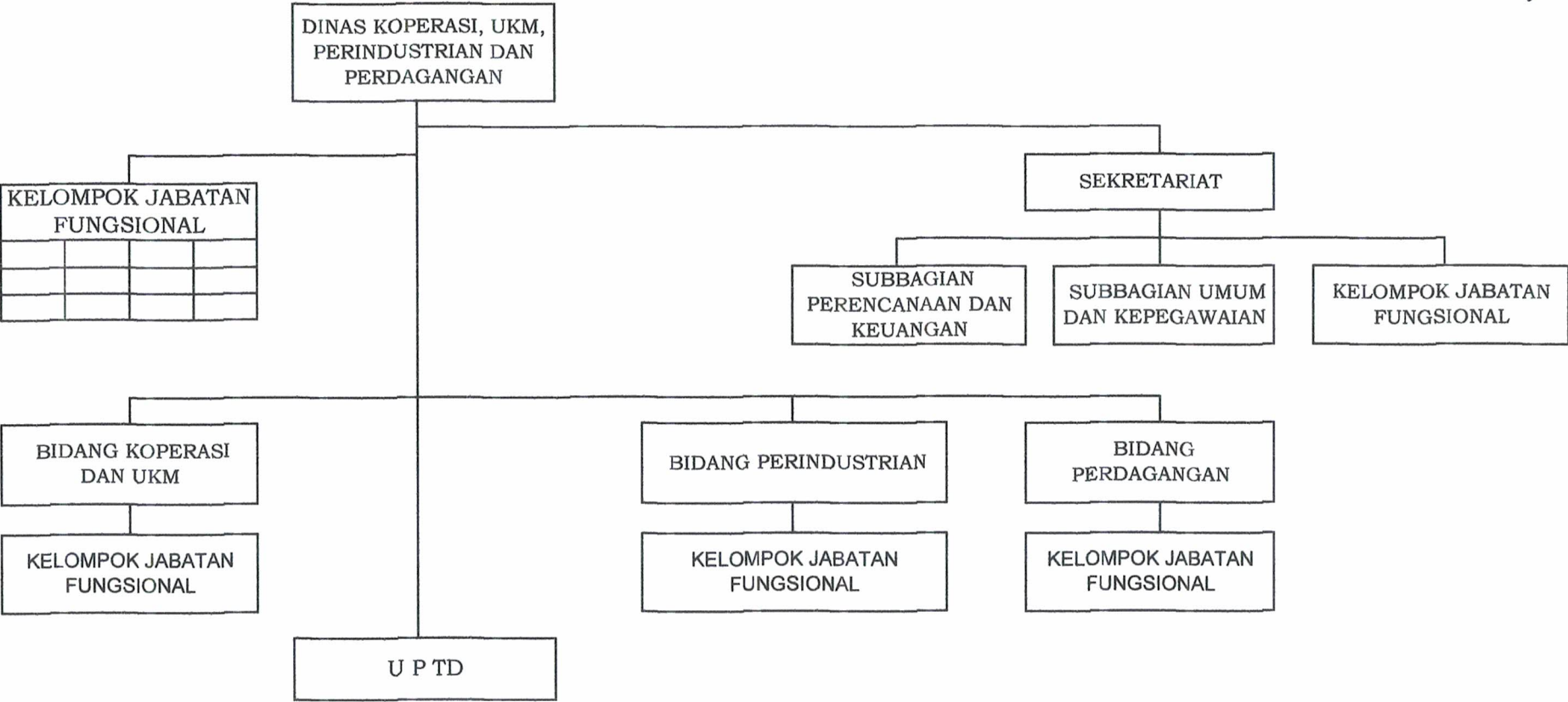
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN

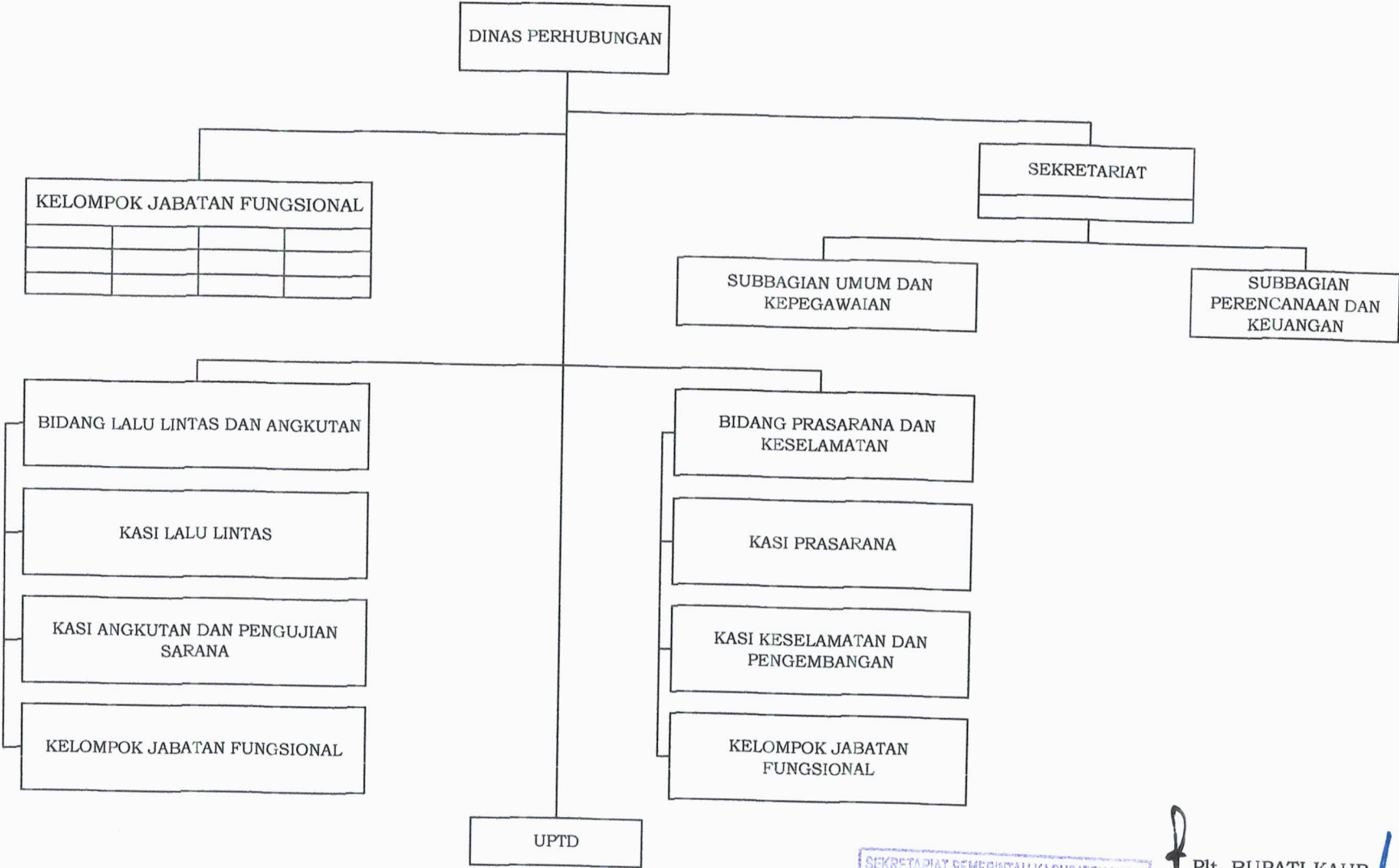
LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Pt. BUPATI KAUR.
HERLIAN MUCHRIM



Plt. BUPATI KAUR,
b. HERLIAN MUCHRIM



SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

Pt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA
PARAF

Plt. BUPATI KAUR
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 100

TANGGAL: 10 Juli 2023



Plt. BUFATI KAUR,
Ø. HERLIAN MUCHRIM

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAU
BAGIAN HUKUM

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITIKEN ARANNYA

PAKAR

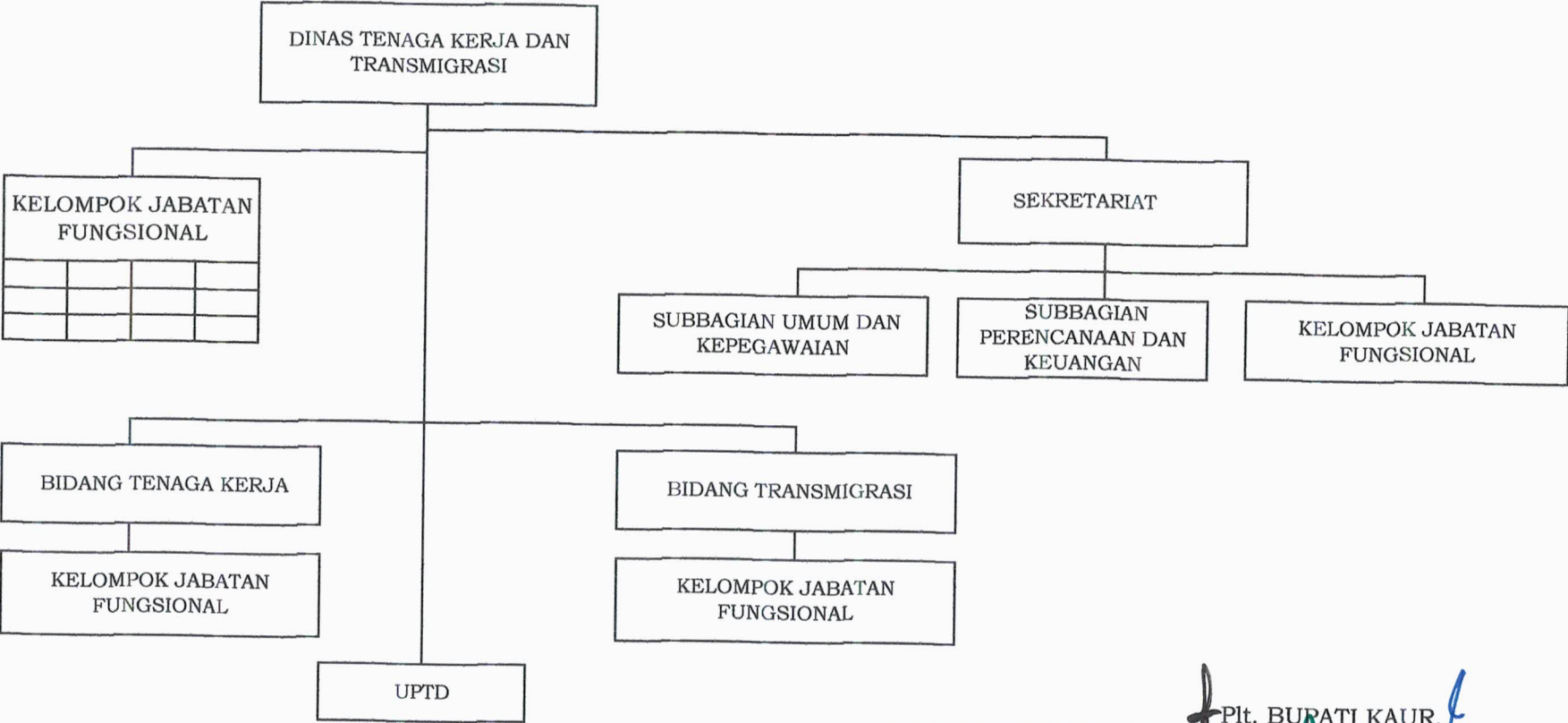
[Signature]

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 100

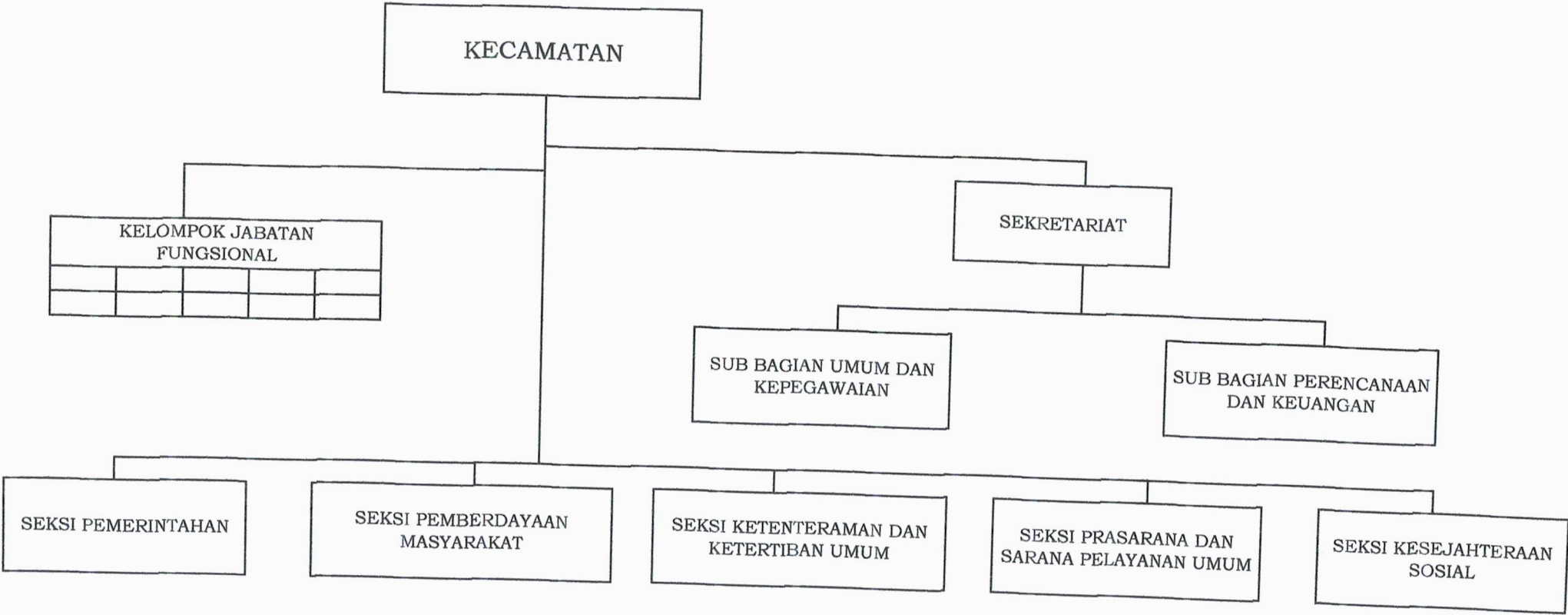
TANGGAL : 10 Juli 2023



Pt. BUPATI KAUR,
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023

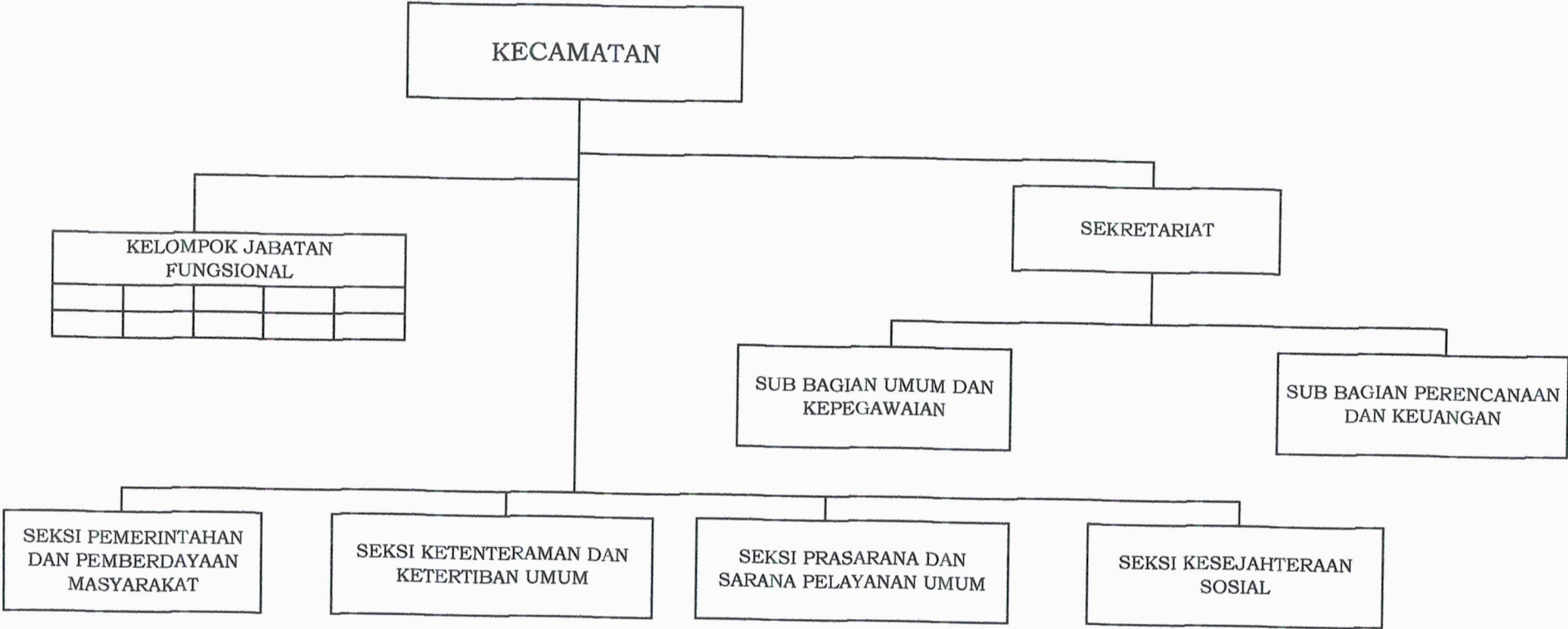


SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITETAPKAN OLEH SAHABATNYA

Pt. BUPATI KAUR
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE B

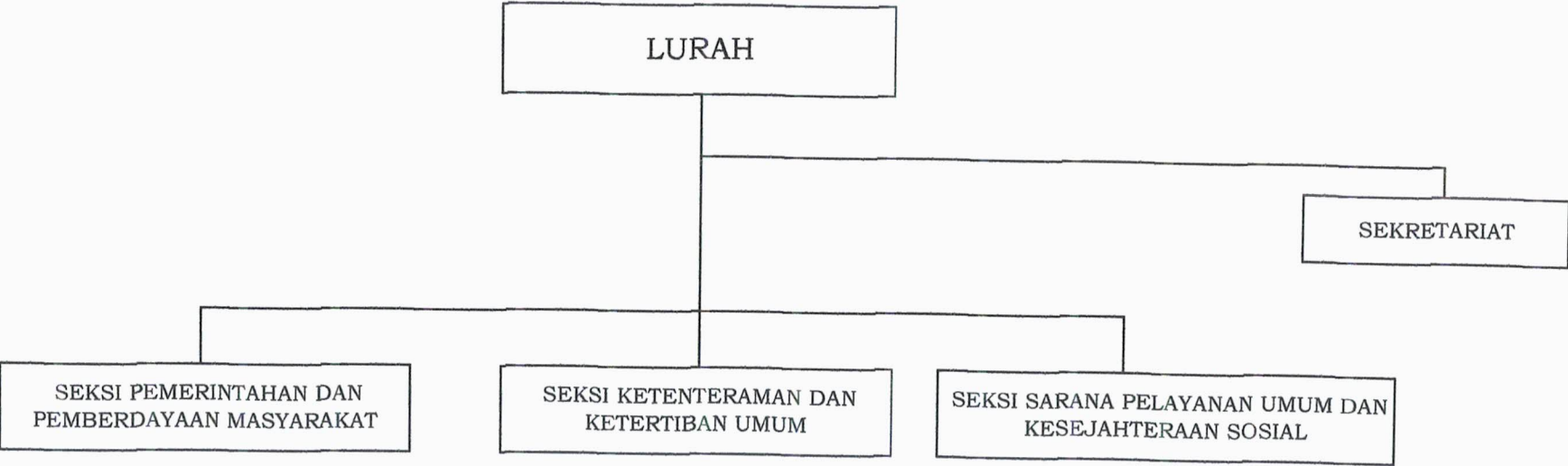
LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Plt. BUPATI KAUR,
[Signature]
HERLIAN MUCHRIM

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 100
TANGGAL : 10 Juli 2023



Plt. BUPATI KAUR,

g. HERLIAN MUCHRIM